

# Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Mira Nurul Hikmah <sup>1\*</sup>, Rimal Mahdani <sup>2</sup>, Syafrizal <sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Teuku Umar, Indonesia

\* [miranurul53@gmail.com](mailto:miranurul53@gmail.com)

## Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memastikan penerapan sistem informasi pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel di badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) serta kontribusinya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada (BPKD) Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak di lingkungan badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Mencakup Kepala BPKD sebagai pengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris BPKD yang berperan dalam koordinasi administratif dan teknis penerapan sistem, serta kepala bidang dan kepala subbidang yang membidangi perencanaan anggaran, penata usahaan keuangan, dan akuntansi pelaporan. Selain itu, operator atau staf teknis SIPD. Analisis penerapan SIPD dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sedangkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dianalisis berdasarkan teori efisiensi Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, akurasi dan transparansi data keuangan, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIPD, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sarana pendukung agar penerapan SIPD dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, optimalisasi SIPD melalui peningkatan kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi menjadi kunci penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel berkelanjutan.

**Keywords:** *Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD), Efisiensi, Pengelolaan Keuangan Daerah*

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan yang efisien di pemerintah daerah merupakan peran krusial untuk memastikan bahwasanya dana yang terbatas dapat digunakan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Zahra, 2024). Namun, pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala, sehingga efisiensi dalam pengelolaan keuangan dana ini juga memungkinkan mereka untuk dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas, menghindari pemborosan, dan juga meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan (Lotu, 2022). Pengelolaan

keuangan daerah di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang mana di dalamnya termasuk birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan masalah transparansi (Zahra, 2024).

Selain itu, birokrasi yang rumit sering kali menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan anggaran, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam realisasi program-program pemerintah daerah (Haryono, 2020). Lebih lanjut, faktor kompetensi juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan peningkatan kompetensi SDM merupakan faktor-faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rosyidah, 2023). Pengelolaan keuangan yang baik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan *public* (Supriyanto, 2016). Namun, dalam pengelolaan keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan anggaran, terutama pada aspek-aspek perencanaan pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami aliran dan alokasi dana, sehingga mengurangi potensi penyelewengan atau korupsi (Edowati et al., 2021).

Transparansi yang terjaga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, karena masyarakat dapat memantau proses penggunaan anggaran secara jelas dan terstruktur (Dione et al., 2020). Di sisi lain, akuntabilitas ini berperan dalam prosedur mendorong para pengelola keuangan publik untuk selalu berpegang pada etika dan standar profesional dalam pengelolaan dana (Afandi et al., 2025). Hal ini membangun kepercayaan publik karena pemerintah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam penggunaan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat (Firdaus et al., 2024).

Penerapan teknologi informasi meningkatkan keamanan dalam pengelolaan keuangan. Sistem digital yang canggih dan mutakhir dilengkapi dengan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi data keuangan dari risiko penyelewengan dan pencurian (Miranda et al., 2022). Dengan menggunakan teknologi enkripsi dan sistem pelacakan, setiap transaksi keuangan dapat diaudit dan dilacak secara *real-time*. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan data tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kegiatan keuangan pemerintah sehingga dapat meminimalkan praktik korupsi (Laoli, et al., 2022). Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan transparansi. Teknologi memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan publik yang lebih efisien dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern (Syahban et al., 2025). Meskipun sistem non-tunai berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan masih menjadi hambatan utama. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang pun masih menjadi ancaman serius (Haryono, 2020).

Dampak dari permasalahan terhadap kinerja keuangan dan kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh masalah dalam pengelolaan keuangan daerah (Rizieq et al., 2026). Penyimpangan anggaran atau ketidakefisienan sering menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengurangi kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pratama, 2022). Misalnya, proses pengadaan yang tidak transparan atau alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dapat menyebabkan proyek pembangunan tertunda atau bahkan gagal. Keterbatasan anggaran dapat membuat kualitas layanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menurun. Lebih lanjut, sistem informasi daerah ini dapat berperan dalam meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memfasilitasi laporan yang lebih efisien (Dione et al., 2020).

SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah. SIPD dirancang dengan berbagai fitur yang mendukung pelaporan *real-time*, transparansi anggaran, dan efisien proses keuangan. Fitur pelaporan *real-time* memungkinkan pihak berwenang untuk mengakses informasi keuangan secara langsung, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat (Permadi et al, 2023). Fitur transparansi pada SIPD memudahkan pemerintah daerah agar dapat memantau anggaran secara lebih menyeluruh dan mengintegrasikan semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan keuangan. Namun, terkait efisiensi proses keuangan dapat dicapai melalui birokrasi yang fleksibel dan otomatisasi dalam pengelolaan data, yang memungkinkan staf keuangan untuk lebih fokus pada analisis dan perencanaan strategis (Pratommi et al., 2023).

Kabupaten Nagan Raya terletak di Provinsi Aceh tepatnya di Suka Makmue, memiliki luas sekitar 3.544,90 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 10 kecamatan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten ini seperti daerah lain di Indonesia, memiliki tantangan dalam hal efisiensi alokasi anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan otonomi daerah, setiap kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri namun seringkali menghadapi kendala yang dalam proses perencanaan serta pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, teknologi informasi mulai diterapkan untuk membantu mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui penerapan SIPD. Sistem tersebut telah diterapkan di badan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. SIPD ini dirancang untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan memfasilitasi, akses informasi yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas (Toding et al., 2023).

Berdasarkan dokumen rencana induk *smart city* Kabupaten Nagan Raya (2025), dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya masih mengalami berbagai tantangan teknis dan struktural. Salah satu masalah utama adalah belum adanya integrasi aplikasi keuangan yaitu SIPD yang mengakibatkan banyak proses input data masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, adanya keterbatasan pada jaringan komputer lokal (LAN) dan tidak adanya pusat data daerah mengakibatkan penyimpanan data masih dilakukan di komputer karyawan, yang meningkatkan kemungkinan kehilangan data. Selain itu, keterbatasan kompetensi SDM juga menjadi kendala utama. Masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan fitur dalam SIPD, sehingga hanya sejumlah tenaga teknis tertentu yang dapat menjalankan sistem dengan optimal.

Ketidakseimbangan ini mengakibatkan beban kerja tidak seimbang dan rentan terhadap kesalahan input. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang disediakan oleh pusat (kemendagri) setiap kali ada pembaruan sistem, sehingga pegawai menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan fitur atau prosedur baru. Di samping itu, akses ke server SIPD nasional juga terhambat karena infrastruktur jaringan internet yang belum merata, terutama di kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Gangguan sambungan atau pembaruan sistem SIPD dari pusat sering mengakibatkan keterlambatan dalam penginputan data dan juga kesalahan teknis. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih belum sepenuhnya mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah di BPKD Kabupaten Nagan Raya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana penerapan sistem ini di BPKD Nagan Raya serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SIPD meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Semarang Timur, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi kesalahan (Berlian et al., 2026). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan SIPD meliputi; Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Dukungan Pimpinan. Kualitas laporan keuangan meningkat setelah implementasi SIPD. Penelitian tersebut hanya menguji kualitas laporan di Kecamatan Semarang Timur, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut efisiensi pengelolaan keuangan atau bagaimana SIPD mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan melihat seberapa efektif SIPD membantu pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana akan berkontribusi dalam pengembangan SIPD yang lebih efisien untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efisiensi waktu, dimana banyak SKPD tidak dapat menginput data sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda). Bappelitbangda sendiri telah memiliki SDM yang berkompeten untuk mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kurangnya kualitas SDM dari SKPD menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data perencanaan. Peneliti juga menemukan bahwa bimbingan teknis yang masih kurang mengakibatkan banyak operator tidak dapat mengoperasikan SIPD (Hersadjati et al., 2025).

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa aplikasi SIPD sudah diterapkan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah kota, masih ada beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya (Nasution et al., 2021). BPKAD telah menggunakan SIPD sebagai sarana untuk merencanakan pembangunan daerah, mengelola keuangan, serta membina dan mengawasi pemerintahan. Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah minimnya analisis mengenai pengaruh penerapan SIPD terhadap efisiensi pengelolaan keuangan, serta kurangnya pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIPD untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya)”.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian mendalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam konteks pemerintah daerah tingkat kabupaten dengan karakteristik wilayah yang relatif terbatas sumber daya, khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada daerah perkotaan atau provinsi, penelitian ini mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan perspektif efisiensi Max Weber untuk menilai secara komprehensif bagaimana SIPD berkontribusi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru mengenai tantangan dan peluang optimalisasi SIPD di daerah non-metropolitan, sehingga memperkaya literatur tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sefcik & Bradway penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait apa, siapa, di mana dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau pengalaman yang diteliti secara mendetail untuk

mengidentifikasi pola yang muncul dalam kejadian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah di badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Pemisahan ini didasarkan pada cara perolehan data oleh peneliti. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data asli. Data ini merupakan data utama penelitian yang dicari untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Nagan Raya, serta catatan arsip, struktur organisasi, dan bahan dokumentasi lainnya yang telah dipublikasikan secara resmi atau diperoleh dari BPKD Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian ini menggunakan pendetatan kualitatif, istilah yang digunakan untuk menyebut responden atau subjek penelitian adalah informan. Informan adalah individu yang memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai di BPKD Kabupaten Nagan Raya, serta Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini diterapkan untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam proses penerapan SIPD untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan BPKD Kabupaten Nagan Raya. Kriteria pemilihan informan meliputi: 1). Memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dalam penggunaan SIPD. 2). Menjabat pada posisi yang relevan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. 3). Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan objektif.

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian atau analisis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan dokumen resmi yang relevan. Selain itu, dilakukan *check* kepada informan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang sebenarnya, sehingga tingkat kredibilitas data dapat terjaga. Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan dan berkelanjutan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, analisis data dilakukan dengan metode analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*) yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang diperkuat dengan analisis teoritis, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan dan keandalan yang memadai.

## Hasil

### ***Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIP)***

Penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di BPKD mencakup enam aspek utama: penggunaan SIPD dalam standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik

organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi para pelaksana, dan lingkungan eksternal. Temuan menunjukkan bahwa SIPD telah berjalan efektif, meskipun ada tantangan teknis.

### **1. Standar dan Sarana Kebijakan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya telah berjalan dengan arah kebijakan yang cukup jelas, terutama terkait integrasi data perencanaan hingga pelaporan. Informan menyampaikan bahwa sistem sudah memberikan alur kerja yang terstruktur sehingga membantu memastikan standar dan sasaran kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Informan Bapak Afzalur Syaref menjelaskan bahwa proses perencanaan anggaran kini menjadi lebih terarah karena seluruh data sudah terintegrasi dalam satu sistem. Ia menyampaikan, *“Sangat bagus, karena semua data sudah dijadikan satu, terintegrasi dari perencanaan hingga realisasi.”* Hal senada disampaikan oleh informan Bapak Andhika Mardhillah yang menilai bahwa penerapan SIPD sudah memiliki alur teknis yang jelas, terutama dalam proses penganggaran. Ia menyebut, *“Secara teknis berjalan lancar, alurnya lebih terstruktur mulai dari penganggaran hingga pencairan.”*

### **2. Sumber Daya**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya, baik dari aspek SDM, fasilitas kerja, maupun jaringan, berperan penting dalam mendukung kelancaran penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya. Secara umum, fasilitas komputer dan dukungan teknis dinilai sudah memadai, namun kualitas jaringan masih menjadi kendala paling menonjol menurut mayoritas informan. Informan Afzalur Syaref menilai fasilitas kerja sudah cukup mendukung, terutama dalam proses penyusunan anggaran. Ia menyampaikan, *“Menurut saya sudah baik, karena proses penyusunan anggaran lebih terarah.”* Namun demikian, ia mengakui bahwa jaringan masih sering bermasalah ketika beban penggunaan meningkat. Hal serupa disampaikan oleh informan Bapak Andhika Mardhillah yang menyatakan bahwa infrastruktur dasar sudah cukup menunjang. Ia mengatakan, *“Kalau dari sistem pendukung sama komputer itu semua memadai.”* Meskipun demikian, menurutnya masih diperlukan penguatan jaringan untuk memastikan proses perencanaan berjalan optimal.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi BPKD Kabupaten Nagan Raya dinilai cukup mendukung pelaksanaan SIPD, terutama karena adanya pembagian tugas yang jelas antarbidang serta mekanisme koordinasi yang teratur. Setiap bidang memiliki peran masing-masing dalam proses input, verifikasi, dan pelaporan, sehingga alur kerja dapat berjalan lebih terarah. Informan (F05-AS) menyampaikan bahwa struktur BPKD sudah cukup mendukung karena BPKD menjadi pusat koordinasi bagi seluruh OPD. Ia mengatakan, *“Struktur organisasi sudah cukup mendukung, apalagi BPKD ini jadi sentral koordinasi.”* Informan (F04-AM) menguatkan hal tersebut dengan menjelaskan bahwa peran BPKD lebih banyak pada tahapan verifikasi, sementara input dilakukan langsung oleh OPD teknis. Ia menjelaskan, *“Struktur organisasi mendukung, karena input dilakukan oleh OPD teknis, sementara BPKD berperan sebagai verifikasi.”*

### **3. Komunikasi Antar Organisasi**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya berjalan cukup baik, meskipun sebagian besar informasi terkait pembaruan fitur dan kebijakan masih bergantung pada pusat (Pusdatin Kemendagri).

Koordinasi internal melalui grup WhatsApp, surat resmi, dan pelatihan rutin menjadi saluran komunikasi yang membantu kelancaran pelaksanaan SIPD. Informan (F05-AS) menjelaskan bahwa informasi terkait perubahan fitur biasanya langsung terlihat pada sistem. Ia mengatakan, *"Biasanya kalau ada penambahan fitur atau perubahan, itu langsung terlihat di sistem saat dibuka."* Informan (F04-AM) menambahkan bahwa informasi dari pimpinan terutama terkait pelaporan disampaikan dengan cukup jelas. Ia menyampaikan, *"Informasi dari pimpinan lebih ke pelaporan dari SIPD."*

#### **4. Disposisi Para Pelaksana**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen para pelaksana SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya tergolong positif. Para pegawai menunjukkan kemauan untuk beradaptasi, saling membantu, dan berusaha menjalankan tugas sesuai prosedur meskipun menghadapi berbagai kendala teknis. Secara umum, disposisi pelaksana mendukung kelancaran penerapan SIPD di lingkungan BPKD. Informan (F05-AS) menjelaskan bahwa para pegawai sudah terbiasa menggunakan SIPD karena tuntutan pekerjaan yang intensif berkaitan dengan sistem tersebut. Ia menyampaikan, *"Kalau di BPKD sendiri semuanya sudah terbiasa, baik staf lama maupun staf baru, karena memang tuntutan kerja pasti sering menggunakan SIPD."* Informan (F04-AM) menyampaikan bahwa meskipun terjadi pergantian pegawai, kompetensi penggunaan SIPD terus meningkat. Ia mengatakan, *"Kalau pegawai tetap itu sudah lancar dan mahir menggunakan SIPD, meskipun kadang ada mutasi."*

#### **5. Lingkungan Eksternal**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lingkungan eksternal, terutama terkait jaringan nasional, kebijakan pusat, dan proses maintenance sistem, menjadi faktor yang paling sering mempengaruhi kelancaran penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya. Sebagian besar kendala yang muncul bukan berasal dari internal BPKD, tetapi dari sistem pusat SIPD yang dikelola secara nasional. Informan (F05-AS) menyampaikan bahwa server pusat yang digunakan secara nasional sering mengalami lonjakan beban, terutama pada periode tertentu. Ia menjelaskan, *"Kendala sering muncul saat lonjakan data seluruh Indonesia atau saat server pusat upgrade, sehingga akses lambat."* Informan (F04-AM) menilai bahwa kendala utama tidak terletak pada data atau sistem internal, tetapi pada jaringan yang terkadang melambat. Ia mengatakan, *"Secara data sudah komplit, kendalanya hanya di jaringan yang kadang lambat."*

#### ***Kontribusi Penerapan SIPD Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah***

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah diukur melalui ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan anggaran, akurasi dan transparansi data, serta pengurangan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan di semua aspek, meskipun ada tantangan teknis.

##### **1. Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Anggaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD memberikan pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan anggaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya. Secara umum, seluruh informan berpendapat bahwa proses menjadi lebih cepat dan teratur. Meskipun demikian, kecepatan tersebut sangat bergantung pada kondisi jaringan nasional yang mengelola sistem SIPD. Informan (F05-AS) menjelaskan bahwa perubahan kecepatan sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan pusat. Ia menyampaikan, *"Kalau jaringan lancar, ya tetap bisa cepat. Tapi kalau jaringan bermasalah ya jadi terhambat."* Hal ini menunjukkan bahwa SIPD memiliki potensi percepatan, namun faktor teknis eksternal tetap

menjadi kendala utama yang memengaruhi ketepatan waktu. Menurut informan (F04-AM), peningkatan kecepatan sudah sangat terasa dibandingkan sistem sebelumnya. Ia mengatakan, *“Menurut saya, sejak SIPD digunakan ada peningkatan kecepatan yang jelas terasa.”* Pernyataan ini diperkuat oleh pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa penyusunan dapat dilakukan lebih teratur karena sistem memberikan alur kerja yang jelas.

**Tabel 1.** Efisiensi ketepatan waktu dan penyusunan dan pelaporan anggaran sebelum dan sesudah penerapan SIPD

| Indikator            | Nilai TA 2023        | Nilai TA 2024        | Keterangan                                                                                                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realisasi Pendapatan | 90,64% dari anggaran | 92,06% dari anggaran | Peningkatan 3,61% menunjukkan percepatan penyelesaian anggaran dan surplus operasional yang lebih tinggi.   |
| Realisasi Belanja    | 89,93% dari anggaran | 90,57% dari anggaran | Surplus/defisit meningkat, mencerminkan efisiensi pengelolaan belanja meski ada hambatan regulasi pusat.    |
| SiLPA                | Rp14.348.318.211,62  | Rp20,475,501,793.16  | Peningkatan SiLPA menunjukkan penyelesaian anggaran lebih tepat waktu dan efisien dengan validasi otomatis. |

Berdasarkan tabel 1. Data keuangan mendukung pernyataan tersebut dengan peningkatan realisasi pendapatan dari 90,64% menjadi 92,06% dan realisasi belanja dari 89,93% menjadi 90,12%. Kenaikan SiLPA yang cukup signifikan menunjukkan penyelesaian anggaran yang lebih tepat waktu dan efisien. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan efisiensi waktu pengelolaan keuangan secara nyata. Sebelum implementasi SIPD, realisasi anggaran dan surplus operasional lebih rendah, mencerminkan proses yang lebih lambat dan kurang teratur. Setelah implementasi SIPD, terdapat peningkatan nyata dalam realisasi anggaran dan efisiensi proses, dengan alur kerja lebih otomatis dan terstruktur. Namun, kendala teknis eksternal masih menjadi pembatas untuk hasil maksimal.

## 2. Akurasi dan Transparansi Data Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD berkontribusi besar terhadap peningkatan akurasi dan transparansi data keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya. Seluruh informan sepakat bahwa SIPD membuat akses data lebih mudah, proses pengecekan lebih cepat, dan verifikasi dapat dilakukan secara langsung melalui sistem tanpa harus meminta data manual ke OPD atau SKPK. Informan (F05-AS) menjelaskan bahwa meskipun informasi dari atasan tidak selalu lengkap, fitur otomatis dalam SIPD membantu memastikan akurasi data tetap terjaga. Ia menyampaikan, *“Kadang informasi dari atasan itu nggak terlalu lengkap, tapi untungnya di SIPD banyak fitur yang otomatis muncul.”* Hal ini menunjukkan bahwa sistem membantu mengurangi risiko kesalahan meskipun koordinasi informasi belum optimal. Informan (F04-AM) menilai bahwa alur informasi dalam SIPD sudah cukup jelas dan mendukung keterbukaan data. Ia menyebutkan, *“Informasinya cukup jelas, apalagi alur sama fitur SIPD itu memang sudah sangat membantu kita.”* Temuan ini menegaskan bahwa tampilan dan struktur SIPD memudahkan pemahaman pengguna, sehingga proses pelaporan menjadi lebih akurat.

## 3. Pengurangan Kesalahan dalam Pencatatan Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD berkontribusi terhadap pengurangan kesalahan dalam pencatatan keuangan di lingkungan BPKD Kabupaten Nagan Raya. Informan menyatakan bahwa struktur input yang terstandar, fungsi validasi otomatis, serta mekanisme verifikasi oleh BPKD memperkecil frekuensi kesalahan besar, meskipun beberapa kesalahan kecil akibat input operator masih tetap terjadi dan memerlukan

pemeriksaan manual. Informan (kabid akuntansi) menyampaikan bahwa sistem membantu menghasilkan neraca yang lebih konsisten, sehingga *“neraca sekarang seringkali langsung balance tanpa banyak selisih seperti aplikasi sebelumnya.”* Pernyataan ini mencerminkan adanya pengurangan kesalahan besar pada tahap konsolidasi laporan keuangan. Dari perspektif bidang anggaran, informan (staf bidang anggaran) menegaskan bahwa sinkronisasi data antar tahap perencanaan mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi atau ketidaksesuaian angka, dengan menyatakan, *“data tersinkron dari musrenbang sampai KUA-PPAS sehingga kesalahan input yang berdampak pada jumlah anggaran berkurang.”*

## Pembahasan

Tahap bagian ini menggabungkan keseluruhan hasil penelitian pada sub-bab 2. dengan landasan teori yang dipakai dalam penelitian, yakni teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn serta teori efisiensi birokrasi Max Weber. Analisis diuraikan secara tematik berdasarkan rumusan masalah penelitian, dengan menonjolkan alasan terjadinya temuan tersebut serta dampaknya terhadap implementasi SIPD dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di BPKD Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian juga diperbandingkan dengan studi terdahulu untuk menguatkan keabsahan analisis (Hersadjati et al., 2025; Nasution et al., 2021; Berlian et al., 2026).

### *Analisis Penerapan SIPD (Variabel X)*

Implementasi SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam maupun luar. Untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi, analisis berikut menggunakan enam dimensi teori implementasi Van Meter & Van Horn. Berdasarkan sisi standar dan sasaran kebijakan, informan menyatakan bahwa SIPD memiliki pedoman dan alur kerja yang jelas. Namun, laporan keuangan daerah menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam konsistensi input dan ketepatan data. Secara teoritis, kondisi ini menggambarkan bahwa standar kebijakan yang telah dirumuskan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai instrumen kontrol implementasi. SIPD secara konsep menuntut keseragaman, tetapi pelaksanaannya masih menghasilkan variasi kualitas data.

Perspektif sumber daya, teori van meter dan van horn menekankan pentingnya kecukupan kapasitas teknis, SDM, serta fasilitas pendukung kebijakan. Informan menggambarkan bahwa perubahan dari sistem sebelumnya ke SIPD memerlukan kompetensi teknis yang lebih tinggi. Laporan keuangan daerah yang memiliki peningkatan kompleksitas data mendukung temuan tersebut, karena volume dan keragaman input makin besar. Dalam kerangka teori, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kemampuan adaptasi organisasional, yang menegaskan bahwa implementasi sistem digital nasional membutuhkan peningkatan kapasitas teknis yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, terutama terkait literasi digital dan pemahaman kebijakan.

Tahap aspek komunikasi kebijakan, wawancara memperlihatkan bahwa instruksi dan informasi kebijakan telah disampaikan secara rutin oleh pemerintah pusat maupun antarunit kerja. Namun variasi interpretasi teknis terhadap aturan SIPD masih muncul, yang tercermin dari revisi berulang pada dokumen perencanaan dan laporan keuangan. Dalam teori Edwards, hal ini menandakan bahwa persoalan implementasi bukan terletak pada intensitas komunikasi, tetapi pada konsistensi pesan kebijakan. Sementara itu, disposisi pelaksana atau sikap pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan kecenderungan positif. Informan memiliki komitmen untuk mengikuti prosedur SIPD, dan hal ini mendukung keberlanjutan implementasi.

Akan tetapi, laporan keuangan memperlihatkan bahwa peningkatan beban data belum sepenuhnya selaras dengan kemampuan sistem dalam memastikan efektivitas proses. Secara keseluruhan, integrasi antara wawancara, laporan keuangan pemerintah daerah, teori implementasi kebijakan, dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah diarahkan sesuai kerangka normatif pemerintah pusat, namun efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kesenjangan antara desain sistem dan realitas administratif daerah. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kesuksesan *e- government* sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur pusat (Nasution et al., 2021).

Analisis menggunakan teori Van Meter & Van Horn memperlihatkan bahwa implementasi SIPD di BPKD Nagan Raya sudah berjalan cukup efektif karena ditopang oleh standar kebijakan yang cukup jelas, SDM kompeten, struktur organisasi yang mendukung, koordinasi internal yang kokoh, serta disposisi pelaksana yang positif. Namun, implementasi belum optimal karena faktor eksternal khususnya jaringan dan server pusat masih menjadi kendala utama yang bersifat sistemik. Hasil ini menguatkan penelitian terdahulu bahwa kesuksesan implementasi e-government di daerah lebih dipengaruhi oleh kesiapan internal, sementara hambatan utamanya bersifat eksternal dan memerlukan penanganan pada tingkat nasional (Hersadji et al., 2025; Nasution et al., 2021).

### ***Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Teori Efisiensi Max Weber***

Penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, namun efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori efisiensi Max Weber, organisasi modern bekerja secara rasional melalui prosedur yang terstandarisasi, pencatatan impersonal, dan mekanisme pengendalian formal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD telah bergerak ke arah birokrasi rasional-legal yang Weber gambarkan, tetapi implementasinya masih dibatasi oleh faktor teknis dan ketergantungan operator. Dengan demikian, analisis efisiensi harus dilihat tidak hanya dari peningkatan output, tetapi juga dari kondisionalitas efektivitas sistem saat diterapkan.

Peningkatan ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan anggaran mencerminkan prinsip rasionalisasi Weber, di mana proses manual digantikan oleh prosedur digital yang lebih cepat dan terstandarisasi. Meski demikian, efisiensi waktu yang dicapai masih bersifat kondisional, karena sangat bergantung pada stabilitas jaringan nasional yang mengelola SIPD. Informan F05-AS menegaskan, "Kalau jaringan lancar, ya tetap bisa cepat. Tapi kalau jaringan bermasalah ya jadi terhambat." Hal ini menunjukkan bahwa rasionalisasi melalui digitalisasi belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan infrastruktur, bukan karena kelemahan sistemnya. Data realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan SiLPA pada Tabel 1. mengonfirmasi percepatan proses, namun juga mengindikasikan bahwa performa dapat meningkat lebih jauh apabila hambatan jaringan dihilangkan. Temuan ini sejalan dengan yang menunjukkan bahwa digitalisasi anggaran memang mempercepat siklus kerja, tetapi tetap mensyaratkan ketersediaan infrastruktur yang stabil (Berlian et al., 2026).

Tahap aspek akurasi dan transparansi, SIPD berfungsi sebagai mekanisme compensating control yang mengatasi kelemahan komunikasi informal antar-unit kerja. Validasi otomatis dan basis data terintegrasi menghasilkan pencatatan yang lebih akurat serta akses data yang lebih transparan, sehingga mencerminkan karakter birokrasi modern menurut Weber: impersonal, terdokumentasi, dan mudah diaudit. Informan F05-AS menegaskan bahwa fitur otomatis membantu menjaga akurasi meskipun informasi dari atasan terkadang tidak lengkap. Di sisi lain, akses langsung auditor BPK menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya meningkat secara internal, namun juga dalam pengawasan eksternal. Hal ini konsisten dengan temuan

terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi memperkuat akuntabilitas publik melalui peningkatan keterbukaan data sebuah ciri penting dari efisiensi birokrasi Weberian (Berlian et al., 2026).

Pengurangan kesalahan pencatatan keuangan menunjukkan bahwa SIPD telah meminimalkan *systematic error* yang sebelumnya umum terjadi, seperti selisih neraca dan ketidaksesuaian angka lintas dokumen. Dalam perspektif Weber, hal ini merupakan hasil dari struktur input yang terstandar dan aturan sistem yang impersonal, sehingga mengurangi ruang terjadinya kesalahan manusiawi. Meski demikian, temuan penelitian mengungkap bahwa sistem belum sepenuhnya menghilangkan human error kecil karena beberapa kesalahan masih bersumber dari ketidaktepatan operator, bukan dari kegagalan sistem. Peningkatan konsistensi pada penyusutan, ekuitas, serta penyisihan piutang menunjukkan bahwa SIPD efektif menekan kesalahan material, namun verifikasi manual tetap diperlukan untuk kualitas laporan yang optimal. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian, yang menemukan bahwa sistem digital dapat menekan *human error* secara signifikan tetapi tidak dapat menggantikannya sepenuhnya tanpa peningkatan kompetensi operator (Nasution et al., 2021). Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD telah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan proses, peningkatan akurasi dan transparansi, serta pengurangan kesalahan material. Namun, efisiensi dalam perspektif Weber belum sepenuhnya tercapai karena digitalisasi masih terbentur kendala teknis dan ketergantungan pada kemampuan operator. Dengan demikian, efisiensi SIPD dapat dinilai progresif tetapi belum maksimal, sehingga masih dibutuhkan penguatan infrastruktur dan peningkatan profesionalisme operator untuk mencapai birokrasi modern yang sepenuhnya efisien sebagaimana digambarkan Weber.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD): efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada BPKD Kabupaten Nagan Raya, maka dapat disimpulkan. 1). Penerapan SIPD di BPKD Kabupaten Nagan Raya telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Sistem ini telah didukung oleh standar kerja yang jelas, kompetensi SDM internal, struktur organisasi yang mendukung, serta komunikasi internal yang efektif. Meskipun demikian, kendala masih ditemukan pada kualitas input data dari OPD serta faktor eksternal berupa gangguan jaringan internet dan ketidakstabilan server SIPD nasional. 2). Penerapan SIPD berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan, meningkatnya akurasi dan transparansi data melalui sistem validasi, serta berkurangnya kesalahan pencatatan keuangan karena proses pengelolaan yang lebih terstruktur dan terkontrol.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan tata kelola keuangan di pemerintah daerah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu instansi dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses data juga memengaruhi kedalaman analisis yang dilakukan. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara penerapan SIPD dengan peningkatan efisiensi waktu, penurunan kesalahan pencatatan, atau peningkatan kinerja pelaporan keuangan.

## Acknowledgment

-

## Daftar Pustaka

- Afandi, A., & Sunarso, S. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Investment Opportunity Set dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023). *Journal Social Society*, 5(2), 1551–1566. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.919>
- Berlian, A. M. F., & Wibowo, E. (2026). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Alun-Alun Karanganyar. *Journal Social Society*, 6(1), 271–285. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.969>
- Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Firdaus, Y. F. H., & Cholik, M. A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 68–78. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i1.4073>
- Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 9(2). <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>
- Hersadjati, M. A., Irawan, & Benius. (2025). Implementation of SIPD in regional financial management: Evidence from Murung Raya Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1675–1688. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4462>
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias. *Jurnal Emba*, 4(1382), 1381-1389. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Lotu, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 10(2), 79-88. <https://doi.org/10.35508/jak.v10i2.8719>
- Miranda, R., Ananda, A., Mulyani, A., & Meriam, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Keuangan pada PT. Gudang Garam Tbk. *Journal Social Society*, 2(2), 105–113. <https://doi.org/10.54065/jss.2.2.2022.310>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 9(2), 109- 116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

- Permadi, R., Yusuf, M., & Sari, D. W. (2023). Implementasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Bpbd Muratara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(1), 09-20. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i1.83>
- Pratama, R. (2022). Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 110-120. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8431>
- Pratommi, M. W., & Muhsyaf, S. A. (2023). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99-109. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>
- Rizieq, A., & Fadholi, A. (2026). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk EMKM pada UMKM Global Media Cendekia. *Journal Social Society*, 6(1), 186–197. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.956>
- Rosyidah, D. M. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 615-635. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.566>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141-161. <https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161>
- Syahban, W., Marzuki, S. N., & Buhasyim, M. A. (2025). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. *Journal Social Society*, 5(1), 28–45. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.625>
- Toding, S., & Maria, E. (2023). Determinan Keberterimaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Ambon menggunakan Technology Acceptance Model. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 12(1), 98-109. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v12i1.2312>
- Zahra, (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya Untuk Mengukur Tingkat Literasi Keuangan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 119- 138. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.102>